

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance In Mining Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2018-2020 Period

Riski Amelia¹, Muhammad Muslih², Kurnia³

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, riskiamelia@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, muhammadmuslih@telkomuniversity.ac.id

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, muhammadkurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstract

This study aims to determine empirical evidence related to the factors that influence tax avoidance which uses institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners and audit committees as independent variables. Mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2020 period are the objects of this research with a total sample of 45 samples from 15 companies. Data collection techniques from www.idx.co.id. The analytical method used is descriptive statistical testing and panel data regression analysis using eviews 10 software. This study obtained the results that simultaneously institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners and audit committees have an effect on tax avoidance. Partially obtained the results that institutional ownership has a negative effect on tax avoidance, and managerial ownership, independent commissioners and audit committees have no influence on tax avoidance with a positive relationship direction. Based on the results of the research that has been done, it is hoped that future researchers can be useful as a source of reading that can provide a source of theoretical and empirical information on this issue.

Keywords-institutional ownership, managerial ownership, independent commissioner, auditcommittee, tax avoidance

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dimana menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 menjadi objek penelitian ini dengan jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 15 perusahaan, dengan total 45 sampel. Teknik pengumpulan data dari www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan *software eviews 10*. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan sumber informasi teoritis dan empiris mengenai permasalahan ini.

Kata kunci: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, *tax avoidance*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia merupakan wajib pajak. Untuk menghindari usaha-usaha yang dilakukan manajemen pajak tidak melanggar aturan, manajemen pajak perlu pengawasan. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya bagian perpajakan

perusahaan. Namun banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa *good corporate governance* belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Dalam perusahaan terdapat hubungan keagenan antara manajemen (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham mengharapkan perusahaan menghasilkan laba yang maksimal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan dengan baik untuk menghasilkan laba yang maksimal dan mendapatkan insentif dari pemegang saham (Darmawan, 2016).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Ariawan dan Setiawan, 2017). Semakin banyak kepemilikan saham manajer disuatu perusahaan maka semakin kecil peluang manajer untuk melakukan kecurangan. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kehadiran dewan komisaris independen juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat.

Komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, dimana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Winata, 2018).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan pada latar belakang, bahwa jumlah besaran penerimaan pajak, khususnya di Indonesia masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. Padahal sektor penerimaan terbesar untuk membiayai perekonomian negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Dalam praktik pelaksanaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan pertambangan. Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Namun, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini terbukti dengan data Kemenkeu RI yang mencatat jumlah WP yang memegang izin usaha pertambangan lebih banyak yang tidak melaporkan SPT nya dibandingkan dengan melapor. Tercatat pada tahun 2020 bahwa 4.532 dari 8.003 WP perusahaan pertambangan yang tidak melaporkan SPT nya (Kemenkeu RI, 2020). Diduga perusahaan yang tidak melaporkan SPT nya karena telah melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut Annisa (2019) fenomena *tax avoidance* ini bahkan lebih umum dikalangan WP badan mengingat besarnya pajak penghasilan perusahaan pertambangan yang dihasilkan, karena faktanya bahwa pajak akan mengambil proporsi yang lebih besar dari laba perusahaan yang dihasilkan dan selanjutnya dapat mengurangi keuntungan yang akan didistribusikan perusahaan pertambangan sehingga alasan itu yang membuat mereka menghindari pajak perusahaan. Maka dari itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mempengaruhi perusahaan dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan juga bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. Mekanisme *good corporate governance* meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *good corporate governance* dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020?
3. Apakah secara parsial:
 - a. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - b. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - c. Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - d. Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - b. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - c. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - d. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Menurut Trisnawati (2016) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penyebab dari penghindaran pajak meliputi beberapa faktor seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, hukuman yang tidak memberikan efek jera, undang-undang yang tidak tepat, dan ketidakadilan yang nyata.

Berdasarkan penelitian ini, pengukuran atau indikator yang digunakan untuk *tax avoidance* yaitu:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi- institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2018).

Pengukuran kepemilikan intitusional mengacu pada penjelasan dari Aprianingsih (2016) bahwa kepemilikan institusional dapat diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham yang beredar atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KI} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki oleh institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perhitungan kepemilikan manajerial diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh manajemen atau direktur pada akhir tahun berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen atau direktur terhadap jumlah saham yang beredar (Aprianingsih, 2016):

$$\text{KM} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki oleh manajemen atau direktur}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

4. Komisaris Independen

Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes dan Ardana, 2014).

Pengukuran komisaris independen diukur oleh proposi anggota dewan komisaris independen berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang ada (Aprianingsih, 2016) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{KDKI} = \frac{\sum \text{anggota dewan komisaris independen}}{\sum \text{seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

5. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif.

Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun.

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Marfiah dan Syam (2016), semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

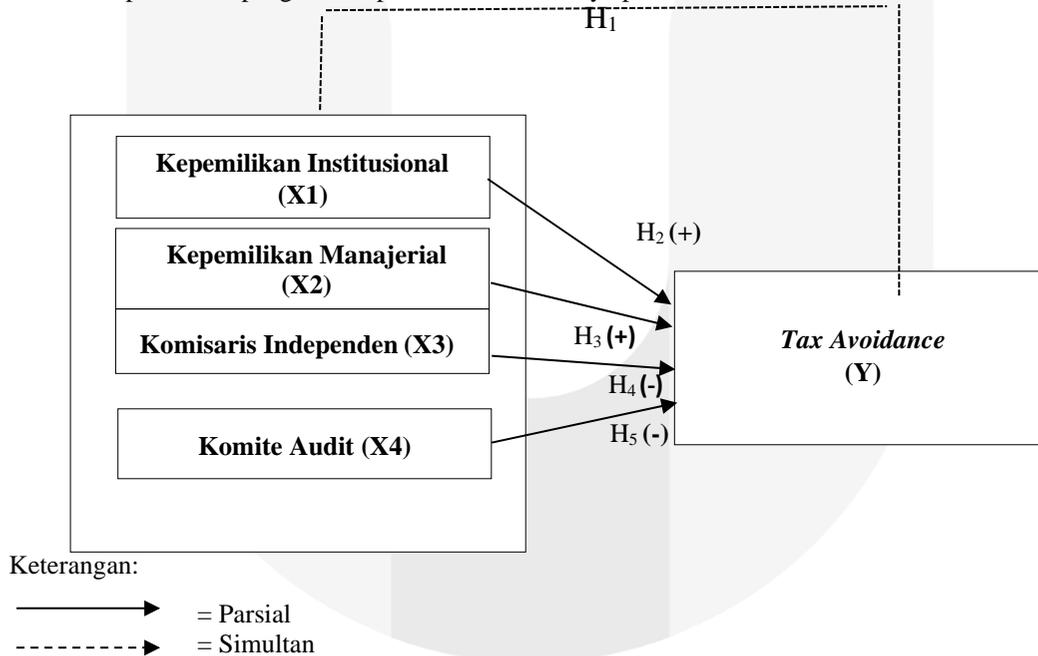
Menurut Mangoting (2015) kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *tax avoidance* untuk dilakukan.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka dalam memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan penghindaran pajak.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan dalam komite audit sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar dapat membantu dewan komisaris demi meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan khususnya pada tindakan *tax avoidance*.



C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. *Good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
4. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
5. Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 menjadi objek penelitian ini dengan jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 15 perusahaan, dengan total 45 sampel. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan program *Eviews*. Model persamaan pada penelitian ini dinyatakan pada formulasi berikut ini:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Y | = <i>Tax Avoidance</i> |
| a | = Konstanta |
| X ₁ | = Kepemilikan Institusional |
| X ₂ | = Kepemilikan Manajerial |
| X ₃ | = Komisaris Independen |
| X ₄ | = Komite Audit |
| b ₁ -b ₄ | = Koefisien Regresi Linear |
| e | = Standar <i>Error</i> |

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis deskriptif Variabel dependen (Y) yaitu *tax avoidance* yang diindikasikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pada tabel 4.1 diketahui jika nilai rata-rata CETR sebesar 0.563835 dan nilai standar deviasi 0.679328, dimana nilai ini menunjukkan jika nilai rata-rata lebih rendah dari nilai standar deviasi sehingga data dinyatakan tidak berkelompok atau bervariasi (heterogen).

Variabel independen yang pertama (X₁) yaitu kepemilikan institusional (KI). Pada tabel 4.1 diketahui jika nilai rata-rata KI sebesar 0.545353 dan nilai standar deviasi 0.204658, dimana nilai ini menunjukkan jika nilai rata-rata lebih tinggi dari nilai standar deviasi sehingga data dinyatakan berkelompok atau tidak bervariasi (homogen).

Variabel independen yang kedua (X₂) yaitu kepemilikan manajerial (KM). Pada tabel 4.1 diketahui jika nilai rata-rata KM sebesar 0.107657 dan nilai standar deviasi 0.156712, dimana nilai ini menunjukkan jika nilai rata-rata lebih rendah dari nilai standar deviasi sehingga data dinyatakan tidak berkelompok atau bervariasi (heterogen).

Variabel independen yang ketiga (X₃) yaitu komisaris independen (KDKI). Pada tabel 4.1 diketahui jika nilai rata-rata KDKI sebesar 0.376786 dan nilai standar deviasi 0.054850, dimana nilai ini menunjukkan jika nilai rata-rata lebih tinggi dari nilai standar deviasi sehingga data dinyatakan berkelompok atau tidak bervariasi (homogen).

Variabel independen yang keempat (X₄) atau yang terakhir yaitu komite audit. Pada tabel 4.1 diketahui jika nilai rata-rata komite audit sebesar 3.200000 dan nilai standar deviasi 0.547726, dimana nilai ini menunjukkan jika nilai rata-rata lebih tinggi dari nilai standar deviasi sehingga data dinyatakan berkelompok atau tidak bervariasi (homogen).

B. Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan model analisis regresi yang dilakukan sebelumnya telah menentukan bahwa *random effect models* yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan dari hasil uji *random effect models* pada tabel 2 dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 1884.032 - 0.944975 X_1 - 0.0717505 X_2 + 1.194917X_3 + 0.1611811X_4 + e$$

Persamaan regresi data panel di atas dapat diartikan seperti berikut:

1. Nilai konstanta bernilai 1884.032 dapat diartikan jika variabel kepemilikan institusional (X1), kepemilikan manajerial (X2), komisaris independen (X3) dan komite audit (X4) memiliki nilai 0 maka *tax avoidance* (Y) pada perusahaan pertambangan bernilai 1884.032 satuan.
2. Koefisien regresi pada kepemilikan institusional (X1) bernilai -0.944975 memiliki arti bahwa setiap naik satu satuan maka nilai *tax avoidance* akan berkurang -0.944975. Nilai koefisien regresi yang menggambarkan bahwa semakin sedikit kepemilikan institusional maka semakin rendah kepatuhan terhadap *tax avoidance*.
3. Koefisien regresi pada kepemilikan manajerial (X2) bernilai -0.0717505 memiliki arti bahwa setiap naik satu satuan maka nilai *tax avoidance* akan berkurang -0.0717505 satuan. Nilai koefisien regresi yang negatif menggambarkan bahwa semakin sedikit kepemilikan manajerial maka semakin rendah kepatuhan terhadap *tax avoidance*.
4. Koefisien regresi pada komisaris independen (X3) bernilai 1.194917 memiliki arti bahwa setiap penambahan satu satuan maka nilai *tax avoidance* akan bertambah 1.194917 satuan. Nilai koefisien regresi yang positif menggambarkan bahwa semakin banyak kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kepatuhan terhadap *tax avoidance*.
5. Koefisien regresi pada komite audit (X4) bernilai 0.1611811 memiliki arti bahwa setiap penambahan satu satuan maka nilai *tax avoidance* akan bertambah 0.1611811 satuan. Nilai koefisien regresi yang positif menggambarkan bahwa semakin banyak komite audit maka semakin tinggi kepatuhan terhadap *tax avoidance*.

C. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R-square* pada Tabel 4.11 hasil uji koefisien determinasi yaitu 0.376295 atau 38%. Nilai tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen hanya mampu menjelaskan 38% *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Sisa 62% *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel lainnya.

2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Nilai probabilitas (F-statistic) yang dapat dilihat dari Tabel 4.12 hasil uji F memiliki nilai lebih rendah dari taraf signifikansi (0.05) yaitu 0.015665. Kesimpulan berdasarkan hasil tersebut adalah H_0 ditolak atau variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2020.

3. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

- a. Variabel kepemilikan institusional (X1) memiliki nilai probabilitas 0.0120 lebih kecil dari taraf signifikansi (0.05) maka H_0 ditolak berarti secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan koefisien regresi negatif sebesar -0.944975, jika koefisien negatif itu artinya positif. Dengan begitu keputusan yang diambil adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- b. Variabel kepemilikan manajerial (X2) memiliki nilai probabilitas 0.0441 lebih kecil dari taraf signifikansi (0.05) maka H_0 ditolak berarti secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan koefisien regresi sebesar -0.717505, jika koefisien negatif itu artinya positif. Dengan begitu keputusan yang diambil adalah kepemilikan manajerial (X2) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- c. Variabel komisaris independen (X3) memiliki nilai probabilitas 0.0372 lebih kecil dari taraf signifikansi (0.05) maka H_0 ditolak berarti secara parsial komisaris independen berpengaruh dengan arah hubungan positif terhadap *tax avoidance* dan koefisien regresi positif sebesar 1.194917 jika koefisien positif itu artinya negatif, artinya komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- d. Variabel komite audit (X4) memiliki nilai probabilitas 0.4162 lebih besar dari taraf signifikansi (0.05) maka H_0 diterima berarti secara parsial komite audit tidak memiliki pengaruh dengan arah hubungan positif terhadap *tax avoidance* dan koefisien regresi positif sebesar 0.161811 jika koefisien positif artinya negatif, artinya komite audit tidak berpengaruh dengan arah hubungan negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, terdapat nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0.545353 yang diketahui terdapat 27 unit sampel memiliki nilai kepemilikan institusional (X1) diatas rata-rata, dan terdapat 24 unit sampel yg memiliki nilai kepemilikan institusional (X1) dibawah rata-rata. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham, maka semakin melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucipto (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, terdapat nilai rata-rata kepemilikan manajerial (X2) sebesar 0.107657 yang diketahui terdapat 25 unit sampel yang memiliki nilai kepemilikan manajerial (KM) diatas rata-rata dan terdapat 26 unit sampel yg memiliki nilai kepemilikan manajerial (X2) dibawah rata-rata. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiza (2015) diperoleh bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil dari statistic deskriptif dewan komisaris independen (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.376786 dimana terdapat 23 unit sampel yang memiliki nilai dewan komisaris independen (X3) diatas rata-rata, dan terdapat 28 unit sampel yang memiliki nilai dewan komisaris independen dibawah nilai rata-rata. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2014) yang menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil statistic deskriptif nilai rata-rata komite audit (X4) sebesar 3.200000 dimana terdapat 9 unit sampel komite audit (X4) diatas nilai rata-rata, dan terdapat 42 unit sampel komite audit (X4) dibawah nilai rata-rata. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh dengan arah hubungan yang negatif terhadap *tax avoidance*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil uji secara simultan *Good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- b. Secara parsial variabel-variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebagai berikut:
 - a. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
 - b. Variabel kepemilikan manajerial (X2) berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
 - c. Variabel komisaris independen (X3) berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
 - d. Variabel komite audit (X4) tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

B. Saran

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, serta wawasan untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna ilmu pengetahuan mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, serta *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan sumber informasi teoritis dan empiris mengenai permasalahan ini. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti dengan menambahkan rentang waktu periode penelitian, mencoba objek penelitian yang berbeda, serta menambahkan variabel-variabel lain, agar memberikan gambaran yang lebih mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, serta *tax avoidance*.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Untuk manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait dengan keputusan perpajakannya. Misalnya terkait peraturan BEI mengenai komite audit dan peraturan OJK mengenai komisaris independen.

b. Bagi Investor

Para investor diharapkan sebelum menanam modal sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu total laba perusahaan, karena semakin besar total laba yang dimiliki perusahaan maka kecenderungan perusahaan dalam menerapkan *tax avoidance* semakin besar pula.

REFERENSI

Agoes, S., dan Ardana, I., C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Agustina, T., N. (2017). Tax Avoidance: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper*.

Annisa, N., A. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. 8 (2), hal 33-42. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*

Aprianingsih, A. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank. 4 (6), hal 13-22. *Jurnal Profita*.

Ariawan, I., M., dan Setiawan, P.,E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. 2 (2), hal 1–12. *E- Jurnal Akuntansi*.

Darmawan, I. (2016). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, *Leverage*, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. 2 (1), hal 7-15. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Khafid, M. (2015). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba. 4. (2), hal 139-148. *Jurnal Dinamika Akuntansi*.

Mangoting, Y. (2015). Aspek Perpajakan dalam Praktik Transfer Pricing. 2 (1), hal 69-82. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Marfiah, D., dan Syam, F., B. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011- 2015. 1 (2), hal 91–102. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi AKuntansi (JIMEKA)*.

Ngadiman dan Puspitasari, C. (2018). Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2016. 18 (3), hal 408- 421. *Jurnal Akuntansi*.

Trisnawati, E. (2016). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Winata, F. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. 4 (1), hal 5-14. *Tax & Accounting Review*.